

DAFTAR BACAAN

Buku

- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Cet. I, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Hadjon, Philipus M. et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. XIII, Kencana, Jakarta, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, ed. 1, cet. 4, PT Alumni, Bandung, 2010.
- Pratiwi, Cekli Setya et al., *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara*, LeIP, Jakarta.
- Raden, Sahran, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. I, CV Bravo Press Indonesia, Pekanbaru, 2025.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Rasyidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Rawls, John, *A Theory of Justice* (Revised Edition), The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1999.

- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, edisi revisi ke-11, PT Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Shafira, Maya et al., *Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier*, Pusaka Media, Bandarlampung, 2023.
- Sinurat, Aksi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, Kupang, 2023.
- Siswanto, Heni dan Aisyah Muda Cemerlang, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2021.
- Smith, Rhona K.M. et al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.
- Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif Empiris dan Gabungan*, Cetakan Pertama, Unigres Press, Gresik, 2022.

Jurnal

- Arif, M., “Analisis Yuridis Eksistensi SKCK dalam Kaitannya dengan Tujuan Pemidanaan”, *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 12 No. 10, Juli 2025.
- Astawa, I Gde Pantja, “Konvergensi Hukum Administrasi Negara: Analisis Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Mengandung Unsur Hukum Perdata”, *Jurnal LITIGASI*, Vol. 25 No. 2, Oktober 2024.
- Myharto, Wiend Sakti, Taufiq Ardi Nugroho, dan Anwar Sadat, “Transformasi Sistem Pemasyarakatan di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Implementasi Pembebasan Bersyarat dan Tantangan dalam Reintegrasi Narapidana ke Masyarakat”, *Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, Vol. 2 No. 1, Januari 2024.
- Naidha, Indi dan Mohammad Saleh, “Implementasi Program Reintegrasi Sosial Narapidana dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Pekerjaan”, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, Vol. 4 No. 2, Juli 2025.
- Nguyen, Quan Huu dan Hieu Van Ngo, “Strain Theories and Labelling Theories: A Critical Examination through an Anti-Oppressive Lens”, *Critical Social Work*, Vol. 22, No. 1, 2021.
- Parangga, Umbu Landu, “Evaluasi Teori Labeling Dalam Proses Stigma dan Stigmatifikasi Pelaku Kejahatan Menurut Howard Becker”, *Global Research and Innovation Journal (GREAT)*, Vol. 1 No. 2, 2025.

- Poluan, Junivan Christian, Debby T. Antow, dan Lusy K.F.R. Gerungan, “Analisis Yuridis Reintegrasi Sosial Dalam Sistem Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan”, *Lex Privatum*, Vol. 14 No. 2, September 2024.
- Putra, I Made Deni Pramudya Adi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Wayan Arthanaya, “Perlindungan Hukum Terhadap Mantan Narapidana Dalam Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3 No. 1, Maret 2022.
- Ritonga, Joni Sandri et al., “Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara”, *Case Law: Journal of Law*, Vol. 4 No. 1, Januari 2025.
- Roring, Edward Benedictus, “Reformulasi Kebijakan SKCK sebagai Penjaminan Hak Non-Diskriminasi dan Akses Kerja Mantan Narapidana”, *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, Vol. 2 No. 4, Juli 2025.
- Rovira, Marti, “Invisible Stripes? A Field Experiment on the Disclosure of a Criminal Record in the British Labour Market and the Potential Effects of Introducing Ban-The-Box Policies”, *The British Journal of Criminology*, Vol. 64 No. 4, 2024.
- Sitepu, Parlindungan, Adil Akhyar, dan Ahmad Rusli Purba, “Analisis Yuridis tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Online terhadap Mantan Narapidana”, *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 6 No. 2, Mei 2024.
- Takim, Moch dan Muhammad Lutfi Rizal Farid, “Catatan Kepolisian Terhadap Pelajar yang Melakukan Aksi Demonstrasi”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 6 No. 1, Februari 2023.
- Widayanti et al., “Tanggung Jawab Hukum Aparatur Negara atas Keputusan Administratif yang Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7 No. 12, Desember 2024.
- Wulandari, Sri, “Reintegrasi Sosial Dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Visi Pemidanaan Dalam Hukum Nasional”, *SEMNASTEKMU*, Vol. 3 No. 2, 2023.
- Yusuf, Muhammad Jafarus dan Agnes Fitryantica, “Penerapan E-Government dalam Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi Mantan Narapidana di Kepolisian Sektor”, *Policies on Regulatory Reform Law Journal (PLJR)*, Vol. 1 No. 1, 2024.

Tesis

Firnando, Lucky, “Urgensi Penghapusan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai Syarat dalam Mendapatkan Pekerjaan: Dampak Labeling terhadap Mantan Narapidana”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Gns

Briefing Paper / Dokumen

Christensen, E. et al., “The Collateral Consequences of Criminal Records”, Briefing
Paper, University of Strathclyde, 2021.